

## **PERAN PASPAMPRES DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL RI-KORSEL: STUDI KASUS LATMA DENGAN PRESIDENTIAL SECURITY SERVICE (PSS) KOREA SELATAN TAHUN 2019**

**Julian Tanjung<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

The Presidential Security Force (Paspampres) plays a crucial strategic role not only in protecting the President of Indonesia but also in supporting the country's defense diplomacy agenda. This article examines the 2019 joint training (Latma) between Paspampres and the Presidential Security Service (PSS) of South Korea as a case study of non-traditional military cooperation. The training was conducted to improve technical capability, build strategic trust, and strengthen bilateral relations. Analyzed using theories of neorealism, national interest, and defense diplomacy, this study reveals that the cooperation reflects Indonesia's broader strategy to construct a security community in East Asia. It argues that such activities are not merely operational but are part of Indonesia's diplomatic tools to expand influence and soft power, while enhancing regional security cooperation.

**Keywords:** Paspampres, defense diplomacy, national interest, RI–South Korea relations, security cooperation.

### **ABSTRAK**

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memiliki peran strategis tidak hanya dalam melindungi Presiden Indonesia, tetapi juga dalam mendukung agenda diplomasi pertahanan negara. Artikel ini mengkaji latihan bersama (Latma) antara Paspampres dan Presidential Security Service (PSS) Korea Selatan pada tahun 2019 sebagai studi kasus kerja sama militer non-tradisional. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, membangun kepercayaan strategis, dan memperkuat hubungan bilateral. Dengan menggunakan teori neorealisme, kepentingan nasional, dan diplomasi pertahanan, penelitian ini menemukan bahwa kerja sama ini mencerminkan strategi Indonesia dalam membangun komunitas keamanan di Asia Timur. Aktivitas semacam ini tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga merupakan bagian dari instrumen diplomatik Indonesia dalam memperluas pengaruh dan soft power, sekaligus meningkatkan kerja sama keamanan kawasan.

**Kata Kunci:** Paspampres, diplomasi pertahanan, kepentingan nasional, hubungan RI–Korea Selatan, kerja sama keamanan.

## **PENDAHULUAN**

Pengamanan terhadap kepala negara merupakan bagian integral dari sistem pertahanan nasional yang tidak hanya menyangkut aspek teknis dan operasional, melainkan juga bersifat strategis dalam diplomasi internasional. Kepala negara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, merupakan simbol negara, pemimpin pemerintahan, sekaligus representasi politik Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, pengamanan terhadapnya mencerminkan bukan hanya upaya menjaga keselamatan individu, melainkan juga mencerminkan citra, kedaulatan, dan legitimasi negara di mata dunia.

Dalam konteks globalisasi dan interdependensi yang semakin tinggi, pengamanan terhadap kepala negara memiliki dimensi yang melampaui aspek teknis dan operasional. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebagai satuan elite di bawah kendali langsung Panglima TNI, memiliki mandat utama untuk menjamin keamanan Presiden dan Wakil Presiden, beserta keluarga inti serta tamu negara setingkat kepala negara/pemerintahan. Seiring dengan kompleksitas ancaman global dan dinamika geopolitik yang terus berubah, peran Paspampres tidak lagi terbatas pada pelindung fisik kepala negara, melainkan juga sebagai bagian dari arsitektur diplomasi pertahanan Indonesia. Dalam konteks tersebut, pengamanan kepala negara memiliki implikasi yang luas terhadap citra diplomasi, kepercayaan strategis antarnegara, serta penguatan kerja sama bilateral dan multilateral.

Paspampres kini juga menjadi instrumen strategis dalam diplomasi pertahanan. Paspampres, sebagai satuan elite di bawah kendali Panglima TNI, memiliki mandat utama untuk melindungi kepala negara sekaligus menjadi aktor diplomatik dalam kerja sama militer non-tradisional. Salah satu bentuk konkret dari kontribusi ini adalah latihan bersama antara Paspampres dan Presidential Security Service (PSS) Korea Selatan tahun 2019. Kegiatan ini menjadi simbol dari menguatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dalam kerangka kemitraan strategis. Lebih dari sekadar peningkatan kapasitas teknis, latihan ini memperlihatkan fungsi diplomasi militer sebagai sarana membangun kepercayaan strategis (confidence building measures) dan interoperabilitas antara aparat keamanan kedua negara.

## **KERANGKA TEORITIS DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan teori neorealisme yang menekankan pentingnya keamanan dan kekuatan dalam sistem internasional yang anarkis (Waltz, 1979). Di samping itu, pendekatan diplomasi pertahanan digunakan untuk menjelaskan bagaimana kerja sama non-tempur seperti latihan Paspampres-PSS dapat membangun kepercayaan strategis dan memperkuat hubungan bilateral. Konsep “kepentingan nasional” juga dijadikan dasar analisis untuk menjelaskan mengapa Indonesia berpartisipasi dalam kerja sama militer non-tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan, reputasi internasional, dan stabilitas kawasan. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka (library research), mengandalkan dokumen resmi, laporan TNI, serta jurnal ilmiah dan media kredibel sebagai sumber data. Data dianalisis secara tematik dan triangulasi sumber.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **1. Hubungan Indonesia-Korea Selatan**

Hubungan Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin sejak 1966 dan secara resmi dalam bentuk hubungan diplomatik pada 1973. Kedua negara terus memperkuat kerja sama dalam berbagai forum, baik bilateral, regional, maupun multilateral, didorong oleh pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kebutuhan yang saling melengkapi. Awalnya, Indonesia menyediakan sumber daya alam dan tenaga kerja, sedangkan Korea Selatan menyuplai teknologi dan modal investasi. Hubungan ini meningkat tajam setelah penandatanganan Joint Declaration on Strategic Partnership pada 2006 yang mencakup 32 bidang kerja sama. Pada 2017, hubungan ini ditingkatkan menjadi Special Strategic Partnership dengan fokus pada empat sektor utama: hubungan luar negeri dan pertahanan, perdagangan dan pembangunan infrastruktur, pertukaran masyarakat, serta kerja sama global.

Dalam bidang pertahanan, kerja sama meliputi pembelian alutsista seperti kapal selam, panser, pesawat T-50i, dan pelatihan bersama, termasuk Latma antara Paspampres dan Presidential Security Service (PSS) Korea Selatan. Diskusi strategis juga difasilitasi melalui forum-forum seperti Army-to-Army Talks, Navy-to-Navy Talks, dan Airman-to-Airman Talks. Di bidang ekonomi dan perdagangan, Korea Selatan menjadi mitra dagang dan investor utama bagi Indonesia. Nilai perdagangan dua arah terus meningkat, dengan Indonesia mengekspor komoditas utama seperti batubara, karet alam, plywood, serta produk tekstil dan perikanan. Investasi Korea Selatan tercatat signifikan di sektor industri, infrastruktur, IT, hingga kesehatan. Kesepakatan IK-CEPA (Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) juga mendorong perluasan kerja sama ekonomi.

Intensitas kunjungan kenegaraan kedua negara tinggi, mencerminkan komitmen politik yang kuat. Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in beberapa kali saling mengunjungi, menandatangani berbagai MoU strategis, termasuk di bidang industri 4.0, kesehatan, transportasi, hingga riset. Di tingkat regional dan global, kedua negara aktif bekerja sama dalam forum ASEAN+3 dan berbagai organisasi internasional. Korea Selatan juga menetapkan kebijakan New Southern Policy yang menjadikan Indonesia mitra prioritas dalam hubungan luar negerinya. Secara keseluruhan, hubungan bilateral ini menunjukkan dinamika saling melengkapi: Indonesia membutuhkan teknologi dan investasi, sedangkan Korea Selatan membutuhkan sumber daya dan pasar. Hubungan ini berbasis pada prinsip demokrasi, HAM, dan keterbukaan ekonomi yang menjadi pondasi kokoh dalam memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

#### **2. Latihan Bersama Paspampres dan Presidential Security Service (PSS) Korea Selatan Tahun 2018-2019**

Latihan bersama antara Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan Presidential Security Service (PSS) Republik Korea merupakan bagian dari agenda kerja sama bilateral di bidang pertahanan non-tempur yang berbasis pada diplomasi pertahanan dan penguatan interoperabilitas satuan pengamanan Very Very Important Person (VVIP). Latihan ini dilaksanakan sebagai implementasi confidence-building measures (CBMs)

untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan dalam konteks hubungan militer-ke-militer yang damai dan kolaboratif.

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018, latihan difokuskan pada pengenalan doktrin pengamanan VVIP ala Korea Selatan, sementara pada tahun 2019 kegiatan lebih diarahkan pada penyempurnaan keterampilan teknis taktis, pertukaran pengalaman operasional, serta peningkatan interoperabilitas prosedural antar pasukan elite kedua negara.

Berdasarkan data dari Laporan PSS ROK 2019 dan dokumen internal Mabes TNI, kegiatan ini diselenggarakan di PSS Training Centre, Gimpo, Korea Selatan, dengan jumlah peserta dari Indonesia sebanyak 27 personel Paspampres, yang terdiri dari perwira, bintara, dan tamtama pilihan dari berbagai Detasemen dan Satuan Pelaksana Paspampres. Peserta menjalani berbagai bentuk pelatihan teknis yang diformulasikan untuk mendukung kompetensi global dalam pengamanan kepala negara. Materi latihan meliputi: Detail Protection Operation, Tactical Shooting, Combat Training (CQB), Explosive Ordnance Disposal (EOD) Awareness, First Aid and Trauma Response, Security Driving, Taekwondo dan Choong-Moo-Do Martial Art.

Pelatihan diselenggarakan selama dua minggu intensif yang diawali dengan pembekalan umum, dilanjutkan dengan simulasi situasional, dan ditutup dengan evaluasi bersama dan pertukaran cinderamata militer. Selama pelaksanaan, seluruh peserta Indonesia juga diberikan orientasi budaya serta protokol kenegaraan versi Korea Selatan, yang memperkaya pemahaman lintas budaya dalam menjalankan misi pengamanan lintas negara.

Dari sisi struktural, latihan ini menjadi simbol kedekatan hubungan bilateral RI–Korsel, khususnya dalam bidang pertahanan non-tradisional. Selain mempererat relasi antar institusi, latihan ini juga membuka ruang diplomatik yang tidak kaku dan bebas dari tekanan politik, sehingga menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat strategic trust kedua negara.

Dapat dikatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat taktis, melainkan juga strategis, karena melibatkan simbol keamanan nasional (Paspampres) dan membuka jalur penguatan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan. Kehadiran Paspampres sebagai representasi kekuatan negara dalam kerja sama internasional ini menandai pentingnya diplomasi militer non-tempur dalam membangun hubungan bilateral yang berbasis kepercayaan dan saling pengertian.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Paspampres dalam Latihan Bersama PSS Korea Selatan**

#### **Peran Operasional**

Peran operasional merujuk pada tugas pokok dan fungsi teknis yang dijalankan oleh Paspampres dalam konteks pelatihan. Dalam kegiatan latihan bersama, peran ini tampak pada keterlibatan langsung personel Paspampres dalam berbagai kegiatan seperti detail protection, tactical shooting, close combat, dan security driving. Kemampuan ini mencerminkan peningkatan profesionalisme dan kesiapan operasional satuan dalam pengamanan kepala negara di level internasional. Peran operasional ini juga memperlihatkan bahwa Paspampres mampu beradaptasi dengan standar pengamanan VIP internasional yang dinamis dan kompleks.

Latihan bersama Paspampres dan PSS Korea Selatan tahun 2019 menunjukkan penguatan kompetensi teknis pengamanan VVIP seperti detail protection, tactical shooting, dan security driving. Pelatihan berlangsung intensif selama dua minggu dengan pendekatan simulatif dan taktis, memperkuat kesiapsiagaan Paspampres dalam situasi domestik dan luar negeri.

### **Peran Simbolik**

Selain fungsi teknis, kehadiran Paspampres dalam latihan bersama juga mengandung nilai simbolik. Paspampres membawa identitas negara dalam setiap interaksi antar satuan pengamanan kepala negara. Simbol ini mengandung pesan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki satuan elite yang profesional, terbuka terhadap kerja sama, dan menjunjung tinggi standar keamanan kepala negara yang bersifat universal. Dalam perspektif hubungan internasional, peran simbolik ini memperkuat nation branding Indonesia sebagai negara yang stabil, kredibel, dan siap bermitra dalam tatanan keamanan global (Holsti, 1970).

Peran simbolik dari keterlibatan Paspampres dalam latihan bersama dengan Presidential Security Service (PSS) Korea Selatan tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai representasi militer sekaligus representasi negara. Paspampres merupakan satuan elite TNI yang berada langsung di bawah Presiden, dan secara institusional menyandang status sebagai pelindung simbol kedaulatan negara: kepala negara itu sendiri. Oleh karena itu, kehadiran Paspampres dalam forum kerja sama internasional memiliki beban simbolik yang sangat tinggi, baik di level militer maupun diplomatik. Paspampres bertindak sebagai simbol profesionalisme militer dan kredibilitas negara. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional dan nilai universal dalam pengamanan kepala negara. Ini sekaligus memperkuat diplomasi lunak dan citra strategis Indonesia di mata mitra global.

### **Peran Diplomatik**

Peran diplomatik merupakan dimensi strategis yang dijalankan oleh Paspampres dalam latihan bersama. Dengan berinteraksi langsung dengan PSS Korea Selatan, Paspampres telah menjalankan bagian dari misi diplomasi pertahanan non-tradisional. Diplomasi pertahanan adalah upaya menggunakan kekuatan militer bukan dalam bentuk kekerasan melainkan sebagai instrumen membangun kepercayaan dan kerja sama antarnegara (Cottey & Forster, 2004). Dalam hal ini, Paspampres berfungsi sebagai aktor diplomatik dalam saluran military-to-military engagement yang memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan.

Melalui perspektif teori peran dalam hubungan internasional, seperti dijelaskan oleh Holsti, peran negara (dan lembaga di dalamnya) mencerminkan bagaimana aktor tersebut melihat dirinya sendiri dan bagaimana ia dilihat oleh aktor lain di sistem internasional. Dalam konteks ini, Paspampres menjalankan peran sebagai protector sekaligus partner bukan hanya melindungi kepala negara, tetapi juga memperkuat keterikatan strategis dengan negara mitra (Holsti, 1970).

Lebih lanjut, peran Paspampres dalam kerja sama ini menunjukkan bahwa militer dalam bentuk non-kombat dapat menjadi bagian dari kebijakan luar negeri suatu negara, khususnya melalui jalur diplomasi pertahanan. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa

militer tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat koersif, tetapi juga sebagai instrumen soft power yang mendukung kepentingan nasional (Tan, 2014). Kegiatan ini berperan sebagai saluran diplomasi pertahanan non-koersif, membentuk komunikasi militer-ke-militer (mil-to-mil engagement), memperluas jejaring kerja sama, dan menciptakan kepercayaan strategis antarnegara.

## **2. Kepentingan Nasional Indonesia**

Dalam konteks hubungan internasional, setiap kebijakan luar negeri pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai dokumen strategis seperti Buku Putih Pertahanan, meliputi perlindungan terhadap kedaulatan negara, integritas wilayah, keselamatan bangsa, serta peningkatan posisi Indonesia dalam sistem internasional (Kemhan RI, 2020).

Kerja sama latihan bersama antara Paspampres dan PSS Korea Selatan tahun 2019 dapat dilihat sebagai bagian dari strategi pertahanan luar negeri yang mendukung pemenuhan kepentingan nasional tersebut. Latihan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung muatan strategis dan simbolik yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif, mandiri, dan profesional dalam membangun kemitraan keamanan. Kepala negara merupakan pusat simbolik dan politik dari eksistensi negara. Maka, segala bentuk pengamanan terhadapnya secara langsung berkorelasi dengan legitimasi dan keberlangsungan sistem pemerintahan. Latihan bersama dengan PSS Korea Selatan memperkuat kapabilitas Paspampres dalam menghadapi tantangan baru seperti serangan asimetris, ancaman lone wolf, dan sabotase teknologi yang tidak selalu bersifat militer formal. Ini berkaitan dengan kepentingan nasional untuk menjamin kesinambungan pemerintahan dan kestabilan domestik.

Dalam konteks hubungan luar negeri, Paspampres juga terlibat dalam pengamanan VVIP saat kunjungan kenegaraan internasional, yang membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap budaya dan protokol negara tujuan. Latihan dengan PSS Korea Selatan menjadi media untuk mempersiapkan aspek ini secara langsung, terutama karena Korea Selatan memiliki sistem pengamanan presiden yang sangat disiplin, hirarkis, dan protokol tinggi. Hal ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan legitimasi negara di mata dunia internasional (Morgenthau, 1948).

Paspampres bukan hanya simbol militer, tapi simbol keunggulan teknis negara. Dalam era global, profesionalisme pasukan elite menjadi alat ukur kemampuan negara dalam menjaga stabilitas dan melindungi pemimpinnya secara efisien, modern, dan terukur. Materi latihan seperti tactical shooting, EOD awareness, CQB, dan security driving yang diajarkan PSS menunjukkan pentingnya Paspampres untuk terus beradaptasi dengan metode pengamanan terkini. Dalam jangka panjang, latihan bersama seperti ini juga mendukung pembentukan pluralistic security community, yaitu komunitas negara-negara yang saling percaya dan tidak menganggap satu sama lain sebagai ancaman (Deutsch et al., 1957). Dengan memperkuat hubungan antar satuan pengamanan kepala negara, Indonesia dan Korea Selatan memperluas kerja sama dari level institusional menjadi strategis, yang dapat mendukung stabilitas kawasan dan solidaritas antarnegara di Asia Timur dan Tenggara.

Kerja sama Paspampres dan PSS Korea Selatan dalam latihan bersama tahun

2019 merupakan bagian integral dari strategi Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasional dalam bidang keamanan, hubungan luar negeri, dan penguatan citra negara. Melalui kerangka neorealisme, kerja sama ini menunjukkan bentuk adaptasi Indonesia terhadap sistem internasional yang anarkis dengan memanfaatkan kekuatan militer dalam dimensi yang kooperatif dan diplomatik. Latihan ini bukan sekadar aktivitas militer, tetapi representasi strategi pertahanan non-tradisional yang mengakar kuat dalam kepentingan nasional Indonesia.

### **3. Dampak terhadap Hubungan Bilateral**

Latihan bersama antara Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan Presidential Security Service (PSS) Korea Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 telah memberikan dampak signifikan terhadap penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya dalam bidang pertahanan non-konvensional. Melalui kerja sama ini, kedua negara menunjukkan peningkatan saling percaya (*strategic trust*), memperluas jalur komunikasi militer-ke-militer, dan menciptakan norma kerja sama yang berbasis pada nilai damai dan profesionalisme.

Salah satu dampak paling nyata dari latihan ini adalah terbangunnya kepercayaan strategis antara kedua negara. Pengamanan kepala negara merupakan ranah yang sangat tertutup, sensitif, dan strategis. Ketika Korea Selatan membuka akses PSS Training Centre-nya kepada Paspampres Indonesia, hal ini merupakan sinyal diplomatik bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra yang kredibel dan dapat dipercaya. Interaksi intensif selama latihan, baik dalam bentuk pelatihan teknis maupun dialog informal antar personel, memperkuat kedekatan hubungan antar institusi yang mewakili simbol tertinggi negara masing-masing. Ini sejalan dengan pandangan Karl Deutsch tentang *security community*, di mana tingkat kepercayaan yang tinggi antarnegara menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan bebas ancaman (Deutsch et al., 1957).

Di sisi lain, latihan bersama ini turut memperkuat relasi pertahanan bilateral yang selama ini lebih banyak difokuskan pada kerja sama strategis tingkat kementerian. Keterlibatan Paspampres dalam ranah taktis-operasional membuka jalur diplomasi pertahanan yang lebih cair, tanpa tekanan politis, dan lebih berbasis pada pengalaman bersama. Hal ini mendukung praktik *defence diplomacy* yang tidak hanya terbatas pada pertemuan tingkat tinggi, tetapi menyentuh aspek teknis dan keseharian personel militer. Seperti dijelaskan oleh Cottey dan Forster (2004), diplomasi pertahanan mencakup pelibatan militer dalam membangun kepercayaan antarnegara melalui pelatihan, kunjungan, dan kerja sama non-tempur yang saling menguntungkan. Selain aspek kepercayaan dan kerja sama militer, latihan ini menghasilkan peningkatan interoperabilitas prosedural antara dua satuan elite. Materi pelatihan seperti detail protection, tactical driving, penanganan EOD, dan simulasi CQB memberikan ruang untuk menyamakan persepsi, standar taktik, serta pola komunikasi taktis dalam pengamanan kepala negara. Dalam situasi tertentu seperti kunjungan kenegaraan lintas negara atau pertemuan internasional antar kepala negara interoperabilitas semacam ini sangat krusial agar operasi pengamanan dapat dilakukan secara terpadu, efisien, dan tidak menimbulkan miskomunikasi lintas institusi.

Partisipasi Paspampres dalam kegiatan semacam ini juga berkontribusi pada peningkatan citra dan reputasi Indonesia di mata internasional. Dalam konteks hubungan bilateral, kehadiran pasukan elite Indonesia dalam pelatihan bersama menegaskan bahwa

Indonesia adalah mitra strategis yang mampu menjaga protokol, keamanan, dan standar internasional dalam pengamanan kepala negara. Reputasi semacam ini tidak hanya bernilai simbolik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam forum regional dan global, seperti ASEAN-ROK Summit, ADMM-Plus, atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) multilateral. Hal ini selaras dengan prinsip dalam neorealisme bahwa reputasi dan kapabilitas non-tempur juga merupakan bentuk kekuatan negara dalam sistem internasional yang anarkis (Waltz, 1979).

Lebih jauh lagi, kerja sama ini mendorong terbentuknya norma baru dalam hubungan keamanan di kawasan, yaitu bahwa keamanan bisa dibangun melalui kerja sama prosedural, bukan konfrontasi militer. Dalam konteks Asia Timur dan Asia Tenggara, di mana dinamika keamanan masih sangat dipengaruhi oleh rivalitas kekuatan besar, kerja sama teknis seperti ini merupakan bentuk kontribusi konkret Indonesia dan Korea Selatan dalam menciptakan pluralistic security community yaitu komunitas negara-negara yang tidak saling memandang sebagai ancaman dan memiliki prosedur kerja sama yang stabil serta konsisten (Acharya, 2001).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latihan bersama antara Paspampres dan PSS Korea Selatan tidak hanya memberikan manfaat di level taktis-operasional, tetapi juga membawa implikasi strategis terhadap hubungan bilateral Indonesia–Korea Selatan. Kerja sama ini menjadi contoh konkret bagaimana soft military engagement dapat dijadikan sarana memperkuat kemitraan antarnegara, memperluas jalur diplomasi pertahanan, dan membentuk jaringan keamanan yang berbasis kepercayaan serta nilai damai.

Latihan bersama antara Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Indonesia dan Presidential Security Service (PSS) Korea Selatan pada tahun 2019 merupakan bentuk kerja sama bilateral yang secara substansial mengandung dimensi strategis yang sangat kompleks. Dalam kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, kegiatan tersebut mencerminkan pertemuan antara realitas empiris kebijakan pertahanan dan teori-teori hubungan internasional yang menekankan pentingnya kekuatan, peran negara, diplomasi, dan komunitas keamanan dalam menjaga stabilitas dan memajukan kepentingan nasional.

Melalui perspektif teori peran, Paspampres tidak hanya menjalankan fungsi teknis sebagai pengawal kepala negara, tetapi juga tampil sebagai aktor diplomatik dan representatif negara di panggung internasional. Peran ini bersifat multidimensional—sebagai protektor, simbol, dan sekaligus komunikator—yang menunjukkan bahwa militer profesional dapat memainkan fungsi non-koersif dalam hubungan internasional (Holsti, 1970). Kegiatan latihan bersama ini menjadikan Paspampres sebagai pelaku penting dalam memperkuat strategic engagement antar negara tanpa harus masuk ke dalam aliansi atau konflik militer terbuka.

Sementara itu, dari sudut pandang neorealisme, latihan ini merupakan respons terhadap kebutuhan negara untuk bertahan dalam sistem internasional yang anarkis. Dalam situasi di mana tidak ada otoritas tertinggi global, negara harus mengandalkan kemampuan internal (self-help) dan membentuk hubungan strategis yang bersifat mutualistik. Latihan Paspampres–PSS mencerminkan strategi Indonesia untuk membangun kapabilitas militer non-konfrontatif serta memperluas jejaring pertahanan dengan negara-negara mitra seperti Korea Selatan (Waltz, 1979). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak pasif dalam dinamika global, tetapi aktif membentuk keseimbangan baru melalui jalur kerja sama militer yang bersifat soft dan preventif.

Dalam konteks diplomasi pertahanan, kerja sama ini menjadi instrumen penting yang menjembatani relasi sipil–militer dengan kepentingan luar negeri. Paspampres, melalui interaksi teknis dalam latihan bersama, memperkuat dimensi mil-to-mil diplomacy yang lebih fleksibel, bebas tekanan politik, dan berbasis pada kepercayaan profesional antar institusi. Ini menunjukkan bahwa aktor militer dapat terlibat langsung dalam proses diplomasi tanpa harus menggunakan kekuatan koersif. Peran seperti ini sangat strategis karena dapat memperluas ruang negosiasi, mengurangi potensi miskomunikasi antar negara, dan memperkuat citra Indonesia sebagai kekuatan yang moderat, terbuka, dan berdaya saing (Cottey & Forster, 2004).

Dari sisi kepentingan nasional, kegiatan ini mencerminkan implementasi langsung dari upaya Indonesia untuk menjaga stabilitas internal dan memperluas pengaruh global. Penguatan kemampuan Paspampres dalam pengamanan kepala negara, peningkatan interoperabilitas, dan pencitraan profesionalisme merupakan bagian dari kepentingan Indonesia untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan dan legitimasi politiknya di mata dunia. Ini sejalan dengan pemikiran Hans Morgenthau bahwa kepentingan nasional tidak hanya mencakup aspek keamanan fisik, tetapi juga kehormatan, citra, dan peran strategis dalam sistem internasional (Morgenthau, 1948).

#### **4. Penguatan Diplomasi Pertahanan dan Security Community**

Latihan bersama antara Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan Presidential Security Service (PSS) Korea Selatan tahun 2019 bukan hanya agenda teknis militer semata, melainkan merupakan perwujudan dari praktik hubungan internasional kontemporer yang kompleks dan multidimensi. Dalam perspektif hubungan internasional, kegiatan ini berada pada titik temu antara kapabilitas negara, representasi simbolik, dan manuver diplomasi pertahanan, yang secara bersamaan mencerminkan transformasi pendekatan keamanan dari yang semula bersifat koersif menjadi lebih kooperatif, preventif, dan komunikatif.

Secara teoritis, kegiatan ini mengaktualisasikan kerangka teori peran, di mana Paspampres mengambil posisi tidak hanya sebagai pelaksana tugas pengamanan domestik, tetapi juga sebagai aktor diplomasi pertahanan tak langsung. Dalam konteks ini, Paspampres memainkan peran ganda—baik sebagai protektor maupun representatif negara. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam sistem internasional yang semakin terkoneksi, peran aktor militer tidak lagi semata-mata sebagai alat kekuatan keras, melainkan dapat digunakan sebagai soft instrument dalam membangun kepercayaan dan memperluas ruang kerja sama (Holsti, 1970). Peran ini menempatkan Paspampres sebagai aktor strategis yang mampu membawa pengaruh tanpa kekerasan, dan sekaligus memperkuat citra positif Indonesia di tingkat internasional.

Dari sudut pandang neorealisme, kegiatan latihan ini adalah refleksi dari strategi survival Indonesia dalam sistem internasional yang anarkis dan tidak terjamin. Dengan keterbatasan aliansi formal di Asia Tenggara, Indonesia memilih untuk membangun jejaring pertahanan melalui bentuk-bentuk kerja sama bilateral yang berlandaskan kepercayaan dan kebutuhan teknis. Latihan bersama seperti ini memperlihatkan bagaimana negara memperkuat dirinya melalui kapabilitas internal dan kerja sama fungsional, sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan eksternal yang penuh ketidakpastian (Waltz, 1979).

Pendekatan diplomasi pertahanan menjadi kerangka penting dalam melihat kegiatan

ini sebagai bagian dari strategi luar negeri Indonesia yang tidak agresif, tetapi tetap proaktif. Paspampres tidak hanya menjalankan pelatihan teknis, tetapi juga mewakili pendekatan lunak Indonesia dalam menjaga keamanan kepala negara sebagai bentuk kehormatan nasional dan simbol stabilitas politik. Seperti dijelaskan oleh Cottey & Forster (2004), diplomasi pertahanan berfungsi untuk memperkuat hubungan antarnegara melalui instrumen militer non-kombatan dan dalam hal ini, peran Paspampres sangat relevan sebagai pelaku utama.

Secara substansi, kerja sama ini mendukung kepentingan nasional dalam dua aspek: pertama, pada tataran domestik, latihan ini memperkuat kesiapsiagaan Paspampres dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan strategis dan memastikan kelangsungan pemerintahan. Kedua, pada tataran internasional, keikutsertaan dalam latihan dengan satuan elite negara mitra memperkuat nation branding, reputasi diplomatik, dan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang kredibel dan moderat (Morgenthau, 1948).

Dalam jangka panjang, keterlibatan Paspampres dalam kerja sama seperti ini berkontribusi pada pembangunan security community kawasan. Praktik pertukaran pengalaman, prosedur, dan standar pengamanan VVIP tidak hanya memperkuat interoperabilitas teknis, tetapi juga memperluas pemahaman lintas budaya dan institusi. Hal ini secara bertahap membentuk norma bersama yang mendasari integrasi keamanan pluralistik, di mana negara-negara Asia Timur dan Tenggara semakin mengurangi kemungkinan konflik terbuka dan memperkuat kerja sama damai berbasis nilai dan prosedur (Acharya, 2001).

Secara implisit, latihan ini juga memberi pesan strategis kepada komunitas internasional bahwa Indonesia adalah negara yang siap, terbuka, dan mampu memainkan peran aktif dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan tidak memilih jalur aliansi formal atau kehadiran militer di luar negeri, Indonesia menunjukkan bentuk *assertive neutrality* yang khas yakni membangun kekuatan tanpa memprovokasi, dan memperluas pengaruh tanpa mendominasi. Model ini relevan bagi negara-negara berkembang yang ingin menavigasi tekanan geopolitik global tanpa kehilangan otonomi strategis.

Dengan demikian, latihan Paspampres–PSS Korea Selatan dapat disimpulkan sebagai praktik konkret dari konvergensi teori hubungan internasional yang mencakup peran aktor, struktur sistem, kekuatan lunak, kepentingan nasional, serta komunitas keamanan. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga strategis menjadikannya model kerja sama pertahanan bilateral yang ideal bagi negara-negara demokratis non-blok yang ingin tetap relevan dan berpengaruh dalam sistem internasional yang terus berubah.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dalam pengamanan kepala negara serta dampaknya terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan, dengan fokus pada latihan bersama Paspampres dengan Presidential Security Service (PSS) Korea Selatan tahun 2019. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Paspampres memainkan peran strategis dalam tiga dimensi utama: operasional, simbolik, dan diplomatik.

Secara operasional, latihan bersama ini meningkatkan kemampuan teknis Paspampres dalam pengamanan VVIP, termasuk keterampilan detail protection, tactical

shooting, security driving, hingga first aid. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan kapabilitas satuan pengamanan kepala negara Indonesia sesuai standar internasional, serta mendukung stabilitas politik nasional.

Dalam peran simbolik, kehadiran Paspampres dalam latihan bersama mencerminkan simbol kehormatan negara, memperkuat citra Indonesia sebagai mitra yang kredibel dan profesional dalam hubungan bilateral. Di saat yang sama, peran diplomatik dijalankan secara aktif melalui pendekatan diplomasi pertahanan non-konfrontatif, menjadikan Paspampres sebagai aktor pendukung hubungan antarnegara melalui kerja sama berbasis kepercayaan dan mutual benefit.

Melalui kerangka neorealisme, latihan ini mencerminkan bentuk respons negara terhadap anarki sistem internasional dengan meningkatkan kapabilitas internal dan membangun aliansi strategis berbasis kepercayaan. Sementara dari perspektif diplomasi pertahanan dan kepentingan nasional, kegiatan ini memperkuat upaya Indonesia dalam meningkatkan pengaruh global dan menjaga legitimasi nasional melalui penguatan satuan elite non-tempur. Dalam konteks security community, latihan ini menunjukkan kontribusi Indonesia dan Korea Selatan dalam membentuk relasi keamanan kawasan yang didasarkan pada norma damai, interdependensi, dan saling percaya.

Dengan demikian, latihan bersama Paspampres dan PSS Korea Selatan bukan sekadar bentuk kerja sama teknis, tetapi merupakan manifestasi nyata dari strategi hubungan internasional yang bersifat komprehensif—menggabungkan aspek keamanan, diplomasi, dan simbolisme nasional dalam satu kegiatan terstruktur yang berdampak luas terhadap hubungan bilateral dan keamanan kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Acharya, A., 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. London: Routledge.
- Buzan, B., Wæver, O. and De Wilde, J., 1998. *Security: A new framework for analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Cottey, A. & Forster, A., 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J.W., 2016. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denzin, N.K., 1978. *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. 2nd

ed. New York: McGraw-Hill.

Deutsch, K.W., Burrell, S.A., Kann, R.A., Lee, M., Lichterman, M., Lindgren, R.E., Loewenheim, F.L. & van Wagenen, R.W., 1957. *Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience*. Princeton: Princeton University Press.

Glaser, C.L., 1997. The security dilemma revisited. *World Politics*, 50(1), pp.171–201.

Holsti, K.J., 1970. National role conceptions in the study of foreign policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), pp.233–309.

Huxley, T., 2011. *Defence diplomacy in Southeast Asia*. In: G. Gill and M. Collins, eds. *Asia-Pacific Security Lexicon*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, pp.65–72.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2020. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Kemhan RI (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia), 2020. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Laporan PSS ROK 2018 Mabes TNI, 2018. *Laporan Kegiatan Latihan Bersama Paspampres dengan PSS Korea Selatan Tahun 2018*. Jakarta: Mabes TNI.

Laporan PSS ROK 2019 Mabes TNI, 2019. *Laporan Kegiatan Latihan Bersama Paspampres dengan PSS ROK Tahun 2019*. Jakarta: Mabes TNI.

Layne, C., 1993. The unipolar illusion: Why new great powers will rise. *International Security*, 17(4), pp.5–51.

Miles, M.B. and Huberman, A.M., 1994. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Moleong, L.J., 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Morgenthau, H.J., 1948. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Nugroho, R., 2008. *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nye, J.S., 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs.
- Sugiyono, 2018. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, R., 2003. *Security community and democratic peace in ASEAN*. *The Pacific Review*, 16(1), pp.119–136.
- Sukma, R., 2012. *Indonesia's Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Soekarno to Soeharto*. London: Routledge.
- Tan, S.S., 2014. *The Transformation of Southeast Asian Military Forces*. London: Routledge.
- Waltz, K.N., 1979. *Theory of international politics*. New York: McGraw-Hill.
- Zed, M., 2004. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.